



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 23 September 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 2. Renstra BPKH Tahun 2019 - 2023
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 27 dari 46 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 3 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Kepala Dewan Pengawas BPKH 4. Kepala Badan Pelaksana BPKH

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.42 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, dengan didampingi Ketua Komisi VIII M. Sc DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, Wakil Ketua Komisi VIII DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, dan Wakil Ketua H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas “**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dan Renstra BPKH Tahun 2019-2023**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp324.887.070.867,- (*tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) beserta rincian anggaran per bidang serta pemutakhiran Rencana Strategis BPKH Tahun 2019-2023.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung target utama dalam RKAT 2020 BPKH sebagai berikut:
 - a. Dana kelolaan Rp132,3 Triliun
 - b. Nilai Manfaat Rp8,05 Triliun
 - c. Alokasi Virtual Account Rp1,2 Triliun (15% dari Nilai Manfaat 2020)
 - d. Kegiatan Kemaslahatan Umat Rp185 miliar.
3. Untuk meningkatkan capaian rencana kerja dan anggaran tahun 2020, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk:
 - a. Melakukan langkah-langkah strategis mengenai rencana keberlanjutan keuangan haji dalam jangka panjang (sustainability).
 - b. Melakukan peningkatan investasi langsung terkait perhajian di Arab Saudi dan dalam negeri serta investasi lainnya yang menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan sosialisasi Program Strategis BPKH kepada masyarakat termasuk Program Kemaslahatan Umat.
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran tahunan BPKH dengan memperhatikan capaian nilai manfaat investasi dana haji.
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam memberikan masukan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441H/2020M.
 - f. Menyampaikan proses lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rincian data penempatan dana haji ke perbankan.

4. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengupayakan agar tidak menggunakan dana Kemaslahatan Umat dalam pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc